

Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi

Nurlev Avana^{*1}, Siska Nerita², Rurisman³, Nurhizrah Gistituati², Rusdinal²

¹Universitas Muhammadiyah Muara Bungo,

²Universitas Negeri Padang

³Universitas PGRI Sumatera Barat

*Corresponding Email: Avananurlevio@gmail.com, Rurisman123@gmail.com,
siskabio@gmail.com

Abstract

Dalam rangka mempersiapkan generasi penerus bangsa untuk berpartisipasi sebagai agen pertumbuhan dalam membangun bangsa yang kompetitif dan mandiri, pendidikan dan pelatihan kejuruan sangat penting dan strategis. Menyadari pentingnya peran pendidikan dan pelatihan vokasi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Penelitian ini adalah kualitatif dengan metode literature review dan model implementasi Sabatier Mazmanian merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti Peraturan Presiden No 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Tujuan utama dari revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi untuk menyiapkan SDM yang kompeten, produktif, dan berdaya saing sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin mengembangkan kemampuan peserta didik dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. 2) Perumusan tujuan dan sasaran telah dirumuskan dengan jelas dan konsisten. 3) Perumusan kebijakan Implementasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah didasarkan pada landasan teori yang kuat dan terpercaya di antaranya Teori Kecocokan Pekerjaan dan Pendidikan, Teori Human Capital, Teori Pilihan Rasional, Teori Kompetensi, dan teori kejuruan 4) Proses Implementasi sudah didasarkan kepada Dasar Hukum yang jelas 5) Komitmen dan Keahlian dari Para Pelaksana Kebijakan sudah baik tetapi perlu ditingkatkan lagi 6) Implementasi Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah mendapatkan dukungan dari stekholder yaitu mitra industri mencapai skor 3,46 dari skala 4, 7) Implementasi Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah mendapatkan dukungan SMK Pusat Keunggulan sebanyak 373 SMK dari sekitar 1.400 dari SMK Pusat Keunggulan telah mengimplementasikan Skema Pemanduan Dukungan dengan melibatkan 349 industri mitra. 8) Prioritas penggunaan sumber daya yang terbatas, memfasilitasi inovasi teknologi, dan mendukung peningkatan industri dalam bentuk suatu kebijakan.

Keywords:

Analisis Kebijakan, Pendidikan Vokasi, Pelatihan Vokasi

Abstract

In order to prepare the next generation of the nation to participate as agents of growth in building a competitive and independent nation, vocational education and training is very important and strategic. Recognizing the important role of vocational education and training, the government has issued Presidential Regulation (Perpres) Number 68 of 2022 concerning the revitalization of vocational education and training. This research is qualitative with the literature review method and the Sabatier Mazmanian implementation model is a research approach used to identify and analyze the factors that influence policy implementation, such as Presidential Regulation No. 68 of 2022 concerning Revitalization of Vocational Education and Vocational Training in Indonesia. The results of this study are 1) The main objective of revitalizing vocational education and vocational training to prepare competent, productive, and competitive human resources is in line with the objectives of national education which wants to develop the ability of learners and form the character and civilization of a dignified nation. 2) The formulation of goals and objectives has been formulated clearly and consistently. 3) The policy formulation for the implementation of vocational education and vocational training has been based on a strong and reliable

theoretical basis including the Theory of Job and Education Matching, Human Capital Theory, Rational Choice Theory, Competency Theory, and Vocational Theory 4) *The implementation process is based on a clear legal basis* 5) *Commitment and Expertise of Policy Implementers are good but need to be improved* 6) *Implementation of vocational education and vocational training has received support from stakeholders, namely industry partners, achieving a score of 3.46 on a scale of 4,* 7) *Implementation of vocational education and vocational training has received support from SMK Centers of Excellence as many as 373 SMK out of around 1,400 SMK Centers of Excellence have implemented the Support Pemdanan Scheme involving 349 partner industries.* 8) *Prioritizing the use of limited resources, facilitating technological innovation, and supporting industrial upgrading in the form of a policy.*

Keywords:

Policy Analysis, Vocational Education, Vocational Training

A. PENDAHULUAN

Dalam menghadapi tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat penting melakukan upaya yang serius dalam bidang pendidikan. Oleh karena pentingnya masalah pendidikan, perlu diatur regulasi dengan menggunakan aturan baku mengenai pendidikan tersebut yang dipayungi oleh sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Upaya pemerintah untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan peningkatan mutu masyarakat Indonesia melalui perbaikan pendidikan. Salah satunya Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi memiliki peran penting dalam mempersiapkan individu untuk dunia kerja dan bertujuan untuk menyiapkan SDM kompeten, produktif, dan berdaya saing untuk menyiapkan dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Pemerintah memberikan perhatian besar terhadap penguatan pendidikan vokasi.

Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang semakin mengakselerasi sinergi berbagai pemangku kepentingan pendidikan vokasi sehingga semakin menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi. "Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi

merupakan upaya dalam rangka pembenahan pendidikan vokasi yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi," disampaikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, saat membuka acara Unite for Education (UFE) Sustainability Forum ke-12 "The Future of Vocational Education and Inclusivity" Dua program unggulan khusus disiapkan untuk transformasi Pendidikan vokasi, yakni SMK Pusat Keunggulan dan Kampus Merdeka Vokasi. Berbagai terobosan Merdeka Belajar pada pendidikan vokasi tersebut dinilai telah berhasil menjembatani lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri. Berbagai bentuk kolaborasi antara pendidikan vokasi dengan dunia industri juga terus terwujud dan semakin erat dari waktu ke waktu. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari terus meningkatnya partisipasi industri terhadap program-program vokasi yang diluncurkan kementerian dari tahun ke tahun. Dukungan dari industri bagi SMK maupun perguruan tinggi vokasi diberikan dalam skema pemadanan yang jumlahnya terus meningkat. "Dari data survei yang 708 industri mitra pendidikan vokasi, tingkat kepuasan mitra industri pada pendidikan vokasi saat ini mencapai skor 3,46 dari skala 4."

Kepercayaan dari pihak industri tersebut, diakui Mendikbudristek, menjadi modal penting untuk semakin memantapkan upaya kita mewujudkan lulusan vokasi

sebagai SDM yang unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 mendatang. Saat ini, setidaknya sepertiga (30 persen) dari jumlah siswa SMK di seluruh Indonesia telah merasakan manfaat dari program SMK Pusat Keunggulan. Sebanyak 373 SMK dari sekitar 1.400 SMK Pusat Keunggulan telah mulai mengimplementasikan Skema Pemadanan Dukungan yang melibatkan 349 industri mitra. "Jumlah investasi industri yang dihasilkan dari program ini mencapai lebih dari 400 miliar. Selain program SMK Pusat Keunggulan, keterlibatan industri pada program dana padanan (matching fund) di perguruan tinggi vokasi juga mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. "Pada tahun 2021, jumlah total dana kolaborasi yang direkomendasikan adalah senilai 65 miliar Rupiah. Kemudian pada tahun 2022 nilai tersebut meningkat menjadi 133 miliar. Namun dalam mengimplementasikan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di lapangan masih terdapatnya berbagai tantangan dan hambatan, termasuk ketersediaan sumber daya, kesenjangan infrastruktur, dan kurangnya kompetensi guru. Dari data yang didapatkan Pendidik (Guru dan Dosen) di Lembaga Vokasi belum memadai. Guru SMK belum memenuhi kebutuhan. Sekitar 56 % guru SMK merupakan guru umum (bahasa, agama, dst). Sehingga masih kekurangan guru keahlian 314.674 orang. Kemudian masih banyak kepala SMK belum dilatih sebagaimana sebagai CEO. Belum lagi Dosen Poltek banyak (70%) yg berlatar belakang akademik. Dan begitu jugakondisi sarana prasarana, masih memiliki keterbatasan fasilitas gedung sehingga mempengaruhi daya tampung, serta kondisi peralatan praktek sudah usang dan terbatas. Oleh karena itu, analisis terhadap penerapan kebijakan ini sangat penting untuk memastikan bahwa implementasinya efektif dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pengembangan pendidikan di madrasah di Indonesia.

B. METHOD

Metode penelitian kualitatif dengan metode literature review dan model implementasi Sabatier Mazmanian merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti Peraturan Presiden No 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Indonesia. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai enam elemen dari model implementasi Sabatier Mazmanian:

1. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten: Dalam penelitian kualitatif, tujuan atau sasaran kebijakan menjadi fokus utama analisis. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi dan menganalisis tujuan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Presiden No 68 Tahun 2022. Peneliti akan melakukan kajian terhadap tujuan tersebut dan melakukan analisis apakah tujuan tersebut jelas dan konsisten dengan peraturan lain yang ada di Indonesia.
2. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan: Dalam metode literature review, peneliti akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur untuk membangun kerangka teoritik yang kuat. Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, serta model implementasi kebijakan Sabatier Mazmanian.
3. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas: Penelitian ini akan mengevaluasi dasar hukum yang mengatur proses implementasi kebijakan, seperti Peraturan Presiden No 68 Tahun 2022 dan peraturan-peraturan pendukungnya. Peneliti akan menganalisis kejelasan dasar hukum tersebut dan memeriksa apakah ada ketidaksesuaian atau konflik dengan peraturan lainnya.
4. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan: Penelitian ini akan

menganalisis komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan dalam implementasi Peraturan Presiden No 68 Tahun 2022. Peneliti akan mengumpulkan data dari sumber-sumber terkait, seperti instansi terkait, pegawai negeri sipil, dan praktisi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

5. Dukungan para stakeholder: Penelitian ini akan mengevaluasi dukungan dari para stakeholder, seperti lembaga pendidikan vokasi, perusahaan, dan masyarakat. Peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.
6. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik: Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Peneliti akan menganalisis faktor-faktor tersebut dan memeriksa apakah kondisi sosial, ekonomi, dan politik saat ini stabil atau tidak.

C. RESULTS AND DISCUSSION

Hasil Dan Pembahasan

1. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten. Perumusan tujuan dan sasaran kebijakan harus jelas dan konsisten untuk memberikan koherensi dan ukuran keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Selain itu tujuan yang konsisten penting untuk memastikan keselaran antara berbagai kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi. Dalam lingkungan yang kompleks dengan tujuan yang konsisten membantu menghindari konflik antara kebijakan yang berbeda. Begitu juga dengan sasaran harus jelas dan konsisten agar memberikan ukuran keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, tujuan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 68 Tahun 2022 terkait dengan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan

vokasi. Dimana pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi bertujuan untuk menyiapkan SDM kompeten, produktif, dan berdaya saing untuk menyiapkan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Sedangkan fungsi dan tujuan Pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Peraturan Presiden tersebut, tujuan utama dari revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi adalah untuk menyiapkan SDM yang kompeten, produktif, dan berdaya saing. Tujuan ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin mengembangkan kemampuan peserta didik dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Tujuan dan sasaran pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah dirumuskan dengan jelas dan konsisten, dimana focus rumusannya menjadi 3 tujuan utama yaitu menyiapkan SDM yang kompeten, menyiapkan SDM yang produktif, dan menyiapkan SDM yang berdaya saing. Tujuan pertama adalah menyiapkan SDM yang kompeten. Dalam konteks pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, kompetensi merujuk pada keterampilan praktis dan pengetahuan yang relevan dengan dunia kerja. Melalui pendidikan vokasi, peserta didik akan dilengkapi dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkontribusi secara efektif di sektor-sektor pekerjaan tertentu. Tujuan kedua adalah menyiapkan SDM yang produktif. Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam

konteks kerja nyata. Dengan demikian, mereka dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan ketiga adalah menyiapkan SDM yang berdaya saing. Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu bersaing di pasar kerja yang semakin global dan kompetitif. Hal ini mencakup pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan tren ekonomi. Seluruh tujuan tersebut sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang merupakan cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Dengan menyediakan pendidikan vokasi yang berkualitas, pemerintah berupaya mencetak lulusan yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan Rumusan kebijakan yang tepat dan berkualitas akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan perumusan Implementasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi harus didasarkan pada landasan teori yang kuat dan terpercaya. Dalam perumusan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 68 Tahun 2022 terkait dengan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah didukung oleh beberapa teori yang kuat diantaranya:
 - a. Teori Kecocokan Pekerjaan dan Pendidikan Teori Kecocokan Pekerjaan dan Pendidikan dikembangkan oleh John L. Holland, seorang psikolog Amerika Serikat, pada tahun 1959. Holland adalah seorang pakar dalam bidang pengembangan karir dan psikologi kerja. Teori ini dikenal dengan sebutan Holland's Theory of

Vocational Choice atau Holland Occupational Themes (RIASEC model). Dalam teorinya, Holland mengajukan enam tipe kepribadian atau minat pekerjaan yang mencerminkan preferensi individu terhadap jenis pekerjaan tertentu. Tipe kepribadian tersebut adalah Realistic (Realistis), Investigative (Penyelidik), Artistic (Artistik), Social (Sosial), Enterprising (Enterprenerial), dan Conventional (Konvensional). Holland berpendapat bahwa individu cenderung memilih pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian mereka. Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya kesesuaian antara minat individu dan lingkungan kerja untuk mencapai kepuasan dalam karir. Teori ini menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan industri. Dalam konteks pendidikan vokasi dan pelatihan, kebijakan yang berdasarkan teori ini akan memastikan bahwa program-program pelatihan dan kurikulum vokasi yang ditawarkan sesuai dengan permintaan tenaga kerja dan keahlian yang diperlukan oleh sektor industri yang sedang berkembang. Teori Kecocokan Pekerjaan dan Pendidikan Holland telah menjadi landasan yang kuat dalam pengembangan program pendidikan dan pelatihan vokasi. Dalam konteks kebijakan pendidikan vokasi, teori ini digunakan sebagai panduan untuk menyusun kurikulum dan program pelatihan yang sesuai dengan minat dan potensi peserta didik. Dengan mempertimbangkan kecocokan antara minat individu dan kebutuhan pasar kerja, diharapkan peserta didik akan lebih termotivasi dan berhasil dalam mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja.

- b. Teori Pilihan Rasional Teori pilihan rasional oleh James S. Coleman adalah tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu

(juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor dimana aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud artinya actor mempunyai tujuan dan tindakan tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut, actor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta keperluan. Teori ini berfokus pada aspek individu yang memilih pendidikan dan pelatihan berdasarkan pertimbangan rasional. Dalam konteks kebijakan pendidikan vokasi dan pelatihan, teori ini menunjukkan bahwa kebijakan harus memberikan informasi yang cukup kepada individu tentang manfaat dan peluang karir yang tersedia melalui pendidikan vokasi. Selain itu, kebijakan juga harus menciptakan insentif dan dukungan yang memadai untuk mendorong partisipasi individu dalam program-program pendidikan vokasi dan pelatihan.

c. Teori Human Capital Pada tahun 1961, Theodore W. Schultz pertama kali memperkenalkan teori modal manusia (human capital). Dalam teorinya Schultz menekankan bahwa manusia adalah suatu modal layaknya bentuk modal lainnya seperti mesin dan teknologi. Teori ini menyatakan bahwa Pendidikan dan pelatihan adalah investasi dalam modal manusia yang akan meningkatkan produktivitas individu dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks kebijakan pendidikan vokasi dan pelatihan pendekatan berdasarkan teori ini akan menekankan pentingnya meningkatkan kualitas Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan tenaga kerja yang trampil dan kompeten. Menurut Becker (1993) dalam Sari (2014), bahwa manusia merupakan investasi yang menghasilkan

pengembalian serta pengeluaran dan bukan semata-mata sebagai sumber daya saja, hal ini dilakukan untuk mengembangkan kualitas serta kuantitas dari manusia. Manusia akan memiliki suatu nilai tambah ketika pendidikan dan keterampilan yang dimiliki dapat berguna. Human capital diukur dengan pendidikan dan pelatihan.

d. Teori Pendidikan Kejuruan Teori pendidikan kejuruan ini dikenal dengan Enam Belas Teori Prosser (Prosser dan Allen, 1952), tiga diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan vokasi/kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan jika tugas latihan dilakukan dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang diterapkan di tempat kerja;
- 2) Pendidikan vokasi/kejuruan akan efektif jika individu dilatih secara langsung dan spesifik untuk membiasakan bekerja dan berfikir secara teratur;
- 3) Menumbuhkan kebiasaan kerja yang efektif kepada siswa akan terjadi hanya jika pelatihan dan pembelajaran yang diberikan berupa pekerjaan nyata dan bukan sekedar latihan.

e. Teori Kompetensi Teori ini menekankan pada pentingnya mengembangkan kompetensi yang relevan dengan dunia kerja dalam proses pendidikan dan pelatihan. Dalam konteks kebijakan pendidikan vokasi dan pelatihan, teori ini menyarankan bahwa program-program vokasi harus didesain untuk mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan mempersiapkan peserta didik untuk memasuki pasar kerja dengan keterampilan yang relevan. Jadi dapat disimpulkan bahwa integrasi teori-teori ini dalam kebijakan Pendidikan vokasi dan pelatihan akan membantu menciptakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, meningkatkan produktivitas dan

- mengurangi kesenjangan social.
3. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas Dasar hukum dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelatihan Kerja. Keduanya memberikan landasan hukum untuk pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur tentang sistem pendidikan nasional yang meliputi pendidikan formal, nonformal, dan informal. Di dalam undang-undang ini, pendidikan vokasi dan pelatihan kerja termasuk ke dalam pendidikan nonformal. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 mengatur tentang pelatihan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar kerja. Pelatihan kerja diatur melalui sistem sertifikasi kompetensi dan pengembangan kurikulum pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 menegaskan kembali pentingnya pendidikan vokasi dan pelatihan kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas industri di Indonesia. Perpres ini memperkuat arahan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021, dengan menetapkan strategi untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, memperkuat kemitraan antara lembaga pendidikan vokasi dan dunia usaha, memperluas akses dan kesempatan belajar bagi masyarakat, serta meningkatkan peran serta pemerintah dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. Selain itu, Perpres No. 68 Tahun 2022 juga sejalan dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kedua rencana ini menyatakan pentingnya pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Perpres No. 68 Tahun 2022 menetapkan target untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan vokasi dan pelatihan kerja hingga 60% pada tahun 2024. Target ini merupakan upaya untuk memperluas akses dan kesempatan belajar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Dengan demikian, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 menjadi instrumen hukum yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan pelatihan kerja di Indonesia. Dalam implementasinya, pemerintah perlu memastikan agar semua pihak terlibat dalam pelaksanaan Perpres ini, seperti lembaga pendidikan vokasi, dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap hasil dan dampak dari program yang dijalankan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan dari Perpres No. 68 Tahun 2022 dapat tercapai secara maksimal dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

4. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan Para pelaksana kebijakan dalam pengimplementasian Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi harus memiliki komitmen dan keahlian yang mumpuni agar program revitalisasi ini dapat berjalan dengan baik dan sukses.
 - a. Komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan

vokasi Komitmen merupakan hal yang sangat penting bagi para pelaksana kebijakan dalam program revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Mereka harus memiliki kesadaran dan tekad yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja yang semakin kompleks dan dinamis. Komitmen ini juga harus diikuti dengan tindakan nyata untuk mengimplementasikan langkahlangkah strategis yang tercantum dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2022.

- b. Keahlian dalam manajemen pendidikan dan pelatihan vokasi Para pelaksana kebijakan dalam program revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi harus memiliki keahlian dalam manajemen pendidikan dan pelatihan vokasi. Mereka harus mampu mengelola program pendidikan dan pelatihan vokasi secara efektif, termasuk dalam hal pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pelatih, serta peningkatan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan vokasi. Keahlian ini dapat membantu para pelaksana kebijakan dalam memastikan program revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Kemampuan untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pihak terkait Para pelaksana kebijakan dalam program revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi harus memiliki kemampuan untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pihak terkait seperti kementerian, lembaga pemerintah, institusi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta dunia industri. Hal ini penting untuk

memastikan bahwa program revitalisasi ini dapat berjalan dengan sinergi dan terintegrasi dengan baik dalam ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia.

- d. Keahlian dalam pengembangan dan implementasi teknologi pendidikan Para pelaksana kebijakan dalam program revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi harus memiliki keahlian dalam pengembangan dan implementasi teknologi pendidikan. Penggunaan teknologi pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi dengan cara yang efektif dan efisien. Para pelaksana kebijakan harus mampu memanfaatkan teknologi pendidikan secara tepat dan optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Contoh Sekolah Pusat Keunggulan SMK Semen Padang merupakan salah satu SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan. SMK PK Skema Pemadanan Dukungan merupakan program pengembangan SMK PK dengan kompetensi keahlian tertentu dalam peningkatan kualitas dan kinerja dengan Industri. Hal ini, diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, yang akhirnya menjadi SMK rujukan yang dapat berfungsi sebagai sekolah penggerak dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. Selain itu, ada program pendampingan yang dirancang untuk membantu SMK PK Skema Pemadanan Dukungan dalam pencapaian output. Pelaksana pendampingan dilakukan oleh perguruan tinggi yang telah memenuhi kriteria. Untuk SMK Semen Padang, ada Institut Teknologi Padang (ITP) yang menjadi pendampingnya. Manfaat sebagai SMK PK Skema Pemadanan

Dukungan adalah mulai dari penguatan kurikulum yang semakin selaras dengan industri atau link and super match teaching factory yang sudah berorientasi produk, peningkatan kapasitas SDM melalui praktisi mengajar, pelatihan upskilling dan reskilling untuk guru yang semakin banyak tersertifikasi. Kemudian, update teknologi, program pemagangan guru, program sekolah anti bullying, mindset change, praktik baik, banch marking, program sekolah berbasis data dan program kewirausahaan digital marketing. Untuk program kewirausahaan digital marketing ini, SMK Semen Padang nantinya akan berusaha mengembangkan unit usaha ke unit produksi dari segi pemasaran berbasis digital marketing melalui e-commerce. Ada beberapa unit usaha yang akan dikembangkan sebagai unit produksi nantinya di SMK Semen Padang. Di antaranya, memproduksi plakat akreluk dan part-part seperti dies interlocking, cutting disc. Partpart ini dengan memanfaatkan peralatan yg dimiliki melalui pembelajaran berbasis projek yang disebut dengan teaching factory. Untuk pembelian peralatan yang diterima SMK Semen Padang dari Kemendikbudristek. Di antaranya, mesin bandsaw (mesin pemotongan material), Turet Milling (mesin fransiskus convention) mesin bubut, mesin CNC Lathe (mesin bubut otomatis) mesin las DC/TIG, mesin Universal Tool Granding and Cut, serta mesin compressor perkakas. Selain dari Kemendikbudristek, dari DU/DI dalam hal ini PT Panasonic Manufacturing Indonesia, kami pun SMK Semen Padang juga menggunakan bantuan pembelian paket peralatan service ac dari Skema Pemadanan Dukungan. Jadi, total bantuan ini dari Kemendikbud jumlahnya mencapai Rp1,5 miliar.

Pada tahun 2023 ini, SMK Semen Padang menargetkan kelanjutan SMK PK Skema Pemadanan dengan Panasonic Gobel berupa aktivitas teaching factory Panasonic Authorized Service, seperti pelatihan untuk service ac, memasang ac atau merakit ac, dan sampai kepenjualan melalui e-commerce dan trouble shooting dengan melibatkan siswa dan guru melalui kelas industri sebagai implementasi Kurikulum Merdeka. Artinya, SMK Semen Padang akan membentuk balai latihan dengan mengeluarkan sertifikasi keahlian service ac bagi siswa, termasuk masyarakat umum yang ikut pelatihan. Ini target kami di tahun 2023 bersama PT Panasonic Manufacturing Indonesia, PT Panasonic Gobel Indonesia dan PT Gobel Dharma Nusantara. Kepala Service Panasonic Gobel, Yuharmi, mengatakan bahwa dunia pendidikan saat ini menjadi prioritas bagi Panasonic Gobel Indonesia, Dan Panasonic Gobel Indonesia merekomendasikan SMK Semen Padang sebagai SMK Pemadanan Dukungan karena beberapa indikator. Di antaranya, prestasi sekolah, aktivitas sekolah seperti magang guru, siswa PKL/Prakerin serta adanya kelas industri. Untuk itu, Panasonic Gobel Indonesia berharap ada kerjasama atau saling suport seperti pemberian materi untuk guru dan siswa. Kerjasama ini bisa ke Panasonic Gobel Indonesia Pusat maupun ke cabang Padang. 5. Dukungan para stakeholder Dukungan stakeholder dari suatu perusahaan yang bisa menentukan arah keseksesan bisnis. Jika hubungan antar stakeholder itu baik, maka akan besar kemungkinan besar bisnis tersebut juga dapat berjalan dengan lancar dan sukses dengan baik. Pada konteks pendidikan disekolah, stakeholder yaitu masyarakat sekolah yang merupakan warga sekolah atau individu yang

berada di sekolah dan sekitar sekolah yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen sekolah, memiliki kesadaran sosial maupun pengaruh terhadap sekolah itu sendiri. Keberlangsungan dan kesuksesan dalam suatu organisasi sangat tergantung dengan para pihak-pihak yang terkait yaitu stakeholder. Pada saat krisis menyerang perusahaan/organisasi, pengelola hubungan dengan para stakeholder memegang peranan sangat penting. Kesalahan dalam mengelola hubungan dengan stakeholder pada saat krisis akan berakibat buruk pada suatu perusahaan/organisasi. Secara umum stakeholder dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal adalah public yang berada didalam ruang lingkup perusahaan/organisasi. Stakeholder eksternal adalah mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan, dan berada diluar perusahaan. Hubungan baik dengan stakeholder memegang peranan penting sehingga dalam kondisi krisis pun kegiatan pendidikan tetap berjalan baik seperti saat ini dalam kondisi pandemic akibat wabah virus corona jumlah peserta didik yang mendaftar dirasa cukup stabil karena kepercayaan para stakeholder tersebut. Sinergitas atau kerjasama stakeholder baik internal dan eksternal demi terjamin nya mutu pendidikan sangat berperan penting dalam kontribusi keberlangsungan pendidikan. Program sekolah akan berjalan dengan lancar apabila mendapat banyak dukungan dari masyarakat, maka sepatutnya internal sekolah yang dibawahi oleh kepala sekolah terus dapat membina hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat, sekolah sendiri harus

memberikan informasi mengenai program atau informasi mengenai masalah yang dihadapi, karena proses pendidikan tidak hanya tergantung pada upaya sekolah tetapi juga tergantung kepada tingginya tingkat partisipasi oleh masyarakat sekitar. Keberhasilan tujuan pendidikan di suatu lembaga sekolah selain tergantung kepada faktor internal saja, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, keberhasilan tujuan pendidikan pun membutuhkan support atau dukungan dari luar warga sekolah atau yang disebut factor eksternal yaitu masyarakat. Stakeholder internal dibutuhkan untuk menjalankan proses pendidikan dan stakeholder eksternal dibutuhkan sebagai penunjang untuk meningkatkan mutu pendidikan. Maka tentunya peran pengelola sekolah harus bisa menciptakan hubungan yang baik dan efektif dengan masyarakat atau yang disebut sebagai stakeholder eksternal. Partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pengendalian mutu pendidikan di sekolah tidak hanya sekedar ditunjukkan oleh kesediaannya membantu dalam bentuk fisik atau bantuan biaya. Akan tetapi partisipasi dan kepedulian tersebut perlu mencakup aspek-aspek mutu layanan belajar. Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat yang dapat mengakomodir kepentingan sekolah dan masyarakat pada tingkat yang lebih luas. Kebijakan yang lebih luas tingkat kabupaten/kota partisipasi masyarakat melalui wadah dewan pendidikan untuk menjembatani pemenuhan kebutuhan sekolah melalui kebijakan legislatif dan eksekutif. Dukungan masyarakat melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merupakan lembaga yang diperlukan pada masa kini untuk mengoreksi dan memberikan masukan ide bagi upaya peningkatan mutu sekolah. Ada 5 tipe pendidikan

vokasi di Indonesia, yaitu : (1) Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan, (2) Akademi Komunitas; (3) Politeknik, (4) Universitas, dan (5) Balai Latihan Kerja (ADB, 2015). Pendidikan vokasi ini ada yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan sebagian berada di bawah departemen teknis dari kementerian seperti halnya pada perguruan tinggi kedinasan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dsb. Banyaknya kementerian yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pendidikan vokasi ini, antara lain dikarenakan pemerintah berencana mengubah rasio penerimaan siswa di pendidikan menjadi 60% vokasi dan 40% akademik pada tahun 2020. Kondisi tahun 2012, pendidikan vokasi masih di angka 49% dan akademik di 51%. Pada tataran pendidikan menengah diketahui bahwa jumlah SMK di Indonesia meningkat dari 10.256 menjadi 11.727 sekolah. SMK tersebut tersebar 57% di Jawa, 20% di Sumatera, dan sisanya di daerah lain. Dari jumlah yang ada, 70% lebih SMA merupakan sekolah swasta dan memiliki jumlah siswa yang lebih banyak. Manajemen yang ada di sekolah akan lebih efektif jika pengolahan pendidikan mampu melibatkan stakeholder terutama pada peningkatan pada peran serta masyarakat menentukan kewenangan, pengadministrasian, dan inovasi kurikulum yang dilakukan oleh masing-masing sekolah. Partisipasi masyarakat untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat memenuhi kebutuhan belajar

adalah untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu semakin meningkat, sejalan dengan semakin luasnya tingkat persaingan. Salah satu model keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemberdayaan pendidikan yang telah lama dikembangkan di negara maju adalah pembentukan “Dewan Sekolah” (School Board) sebagai wujud pengembangan dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan. Upaya untuk mencapai kualitas lulusan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja tersebut, pada pelatihannya perlu didasari dengan kurikulum yang di-rancang dan dikembangkan dengan prinsip kesesuaian dengan kebutuhan stakeholders. Kurikulum yang merupakan salah satu kelengkapan dalam penyelenggaraan pendidikan memegang peran penting dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Kurikulum pendidikan kejuruan secara spesifik memiliki karakter yang mengarah kepada pembentukan kecakapan lulusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan tertentu. Hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi di industri terjadi sangat cepat, sementara hal yang sebaliknya terjadi pada dunia pendidikan. Untuk itulah mitra industri sangat diperlukan sebagai wahana pengenalan terhadap dunia kerja, standar kerja, dan perkembangan teknologi mutakhir. Jaringan kerja dengan industri atau dunia kerja perlu dikembangkan untuk membantu kelancaran dan keuntungan akademik yang optimum. Stakeholder yang mendukung upaya mewujudkan lulusan vokasi sebagai SDM yang unggul dalam menyongsong Indonesia Emas 2045: 1. Industri Mitra Industri mitra merupakan salah satu stakeholder yang mendukung pendidikan vokasi. Data survei

menunjukkan tingkat kepuasan industri mitra terhadap pendidikan vokasi saat ini mencapai skor 3,46 dari skala 4. Kepercayaan yang diberikan oleh pihak industri menjadi modal penting dalam mewujudkan lulusan vokasi yang unggul. Dukungan industri mitra dapat berupa pelibatan dalam program-program pendidikan vokasi, penyediaan tempat magang atau kerja praktik, serta memberikan masukan tentang kebutuhan dan perkembangan industri yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum vokasi. Contoh industry mitra pada Pelaksanaan program kemitraan merupakan proses menjalankan kegiatan yang telah diprogramkan dan diorganisasikan. Berikut adalah contoh pelaksanaan program kemitraan tri sentra pendidikan yang dilakukan di sekolah yaitu Pengembangan Kapasitas Warga Sekolah Hal terpenting dalam membangun kemitraan antara sekolah, orang tua/ wali, dan masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan benar adalah pemahaman semua warga sekolah tentang hakikat kemitraan yang meliputi tujuannya, program/kegiatan, dan dampak yang diharapkan sebagai muara akhir dari kemitraan tersebut, yaitu terciptanya ekosistem pendidikan yang dapat membangun karakter dan budaya berprestasi bagi semua warga sekolah khususnya peserta didik. Pengembangan kapasitas warga sekolah tentang kemitraan antara sekolah, orang tua/wali dan masyarakat diantaranya a. Diskusi membahas tentang hakikat kemitraan tri sentra pendidikan yang melibatkan narasumber ahli; b. Pelibatan semua komponen warga sekolah dalam penyusunan RAPK; dan c. Sosialisasi tentang kemitraan di lingkungan warga sekolah. Pertemuan Wali Kelas dengan

Orang Tua/Wali, Wali kelas berperan penting dalam menjalin kemitraan dengan orang tua/wali murid. Pertemuan wali kelas dengan orang tua/wali murid dilaksanakan minimal 2 kali per semester atau 4 kali dalam 1 tahun ajaran, yakni: (1) pada hari pertama masuk sekolah di bulan Juli; (2) menjelang ujian tengah semester 1 di bulan September; (3) Menjelang ujian tengah semester 2 di bulan Maret; dan (4) setelah ujian akhir semester di bulan Juni. 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek): Mendikbudristek mengakui pentingnya kepercayaan dari pihak industri sebagai modal dalam mewujudkan lulusan vokasi yang unggul. Melalui kebijakan dan program-programnya, Mendikbudristek berupaya untuk semakin mematangkan upaya dalam pendidikan vokasi guna mendukung visi Indonesia Emas 2045. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah melalui program SMK Pusat Keunggulan, di mana sekitar sepertiga siswa SMK di seluruh Indonesia telah merasakan manfaatnya. Mendikbudristek juga mendorong implementasi Skema Pemadanan Dukungan yang melibatkan industri mitra sebagai upaya untuk meningkatkan kolaborasi antara pendidikan vokasi dan dunia industry 3. SMK Pusat Keunggulan SMK Pusat Keunggulan merupakan lembaga pendidikan vokasi yang turut mendukung upaya mewujudkan lulusan vokasi yang unggul. Saat ini, sebanyak 373 SMK dari sekitar 1.400 SMK Pusat Keunggulan telah mengimplementasikan Skema Pemadanan Dukungan dengan melibatkan 349 industri mitra. Melalui kolaborasi dengan industri, SMK Pusat Keunggulan dapat menyelenggarakan program-program yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, memberikan kesempatan

magang, serta memfasilitasi peluang kerja bagi siswa. Dukungan dari stakeholder di atas dapat berupa partisipasi aktif dalam penyusunan kurikulum yang relevan, pelibatan dalam program magang atau kerja praktik, menyediakan sumber daya dan fasilitas, serta memberikan masukan tentang perkembangan industri dan kebutuhan tenaga kerja. Melalui kolaborasi yang kuat antara pendidikan vokasi, industri mitra, Kementerian Pendidikan, dan SMK Pusat Keunggulan, diharapkan dapat tercipta lulusan vokasi yang berkualitas dan siap bersaing dalam menghadapi tuntutan. Dalam konteks sekolah, Stakeholder adalah masyarakat sekolah yang merupakan warga atau individu yang berada di sekolah dan di sekitar sekolah yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen sekolah, memiliki kesadaran sosial dan mempunyai pengaruh terhadap sekolah. dalam upaya memberikan informasi kepada Stakeholder tentang keberadaan SMK Negeri 2 Kota Jambi untuk memenuhi tuntutan dunia kerja dan pembangunan pada umumnya. dan diharapkan memberikan nilai tambah bagi kemajuan Sekolah Menengah Kejuruan khususnya SMK Negeri 2 Kota Jambi sebagai salah satu upaya pencitraan SMK di mata masyarakat. Dalam perjalanan memacu mengejar ketertinggalan dunia pendidikan, SMK Negeri 2 Kota Jambi secara terus menerus melakukan kegiatan Inovasi, Kreasi serta Motivasi bagi setiap warga sekolah. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kota Jambi merupakan salah satu dari sembilan puluh SMK yang ditetapkan Direktorat PSMK sebagai sekolah yang dikembangkan sebagai sekolah bertaraf Internasional melalui Program Indonesia Vocational Education Strengthening

(SMK SBI INVEST) Loan ADB 2008-2013. Dalam menjalankan aktivitas SMK Negeri 2 Kota Jambi didukung oleh 111 orang tenaga pendidik, 18 orang tenaga kependidikan, serta ditunjang oleh fasilitas adanya gedung serbaguna, labor komputer, kantin, percetakan dan sablon, biro perjalanan, studio foto, hotspot, dll. Kenadala yang dihadapi SMK Negeri 2 kota Jambi yaitu Masalah yang sering muncul di sekolah adalah minimnya stakeholder dalam suatu lembaga pendidikan yang memberikan celah stakeholder untuk melakukan bimbingan yang tidak sesuai dengan keahliannya, sehingga yang menjadi imbasnya adalah siswa sebagai anak didik yang tidak mendapatkan solusi yang maksimal. Padahal siswa adalah sasaran pendidikan yang dibentuk melalui bimbingan, keteladanan, bantuan, latihan, pengetahuan yang maksimal, kecakapan, keterampilan, nilai, sikap yang baik dari stakeholder. Maka hanya dengan stakeholder hal tersebut dapat terwujud secara utuh, sehingga akan menciptakan kondisi yang menimbulkan kesadaran dan keseriusan dalam memecahkan semua masalah yang timbul dari siswa.

- e. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia adalah salah satu negara yang terjebak dalam status berpenghasilan menengah, bahkan sejak tahun 1960-an. Hal itu disebabkan oleh kegagalan negara berpenghasilan menengah untuk memiliki pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang lebih cepat melalui inovasi teknologi dan peningkatan industri dibandingkan dengan negara berpenghasilan tinggi. Hal-hal seperti memprioritaskan penggunaan sumber daya yang terbatas, memfasilitasi inovasi teknologi, dan mendukung peningkatan industri dalam bentuk suatu kebijakan menjadi faktor yang sangat krusial bagi pemerintah negara

berpenghasilan menengah untuk mengatasi masalah ini. Stabilitas sosial sendiri merupakan pembedaan suatu negara memiliki gangguan-gangguan yang bersifat politis ideologis, sosial ekonomis, militer dan lainlain yang telah dapat di hindarkan. Stabilitas sosial sering terjadi, dalam mewujudkan stabilitas sosial guna menunjang efektifitas pembangunan di daerah masyarakat daerah. Stabilitas sendiri pada kondisi sosial dapat dimanfaatkan dalam masyarakat dari suatu program pendidikan berupa suatu program pendidikan adalah berupa perbaikan dalam hal penghasilan, produktivitas, kesehatan, nutrisi, kehidupan keluarga, kebudayaan, rekreasi, dan partisipasi masyarakat. Perbaikan penghasilan dan sebagian produktivitas, adalah merupakan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Perbaikan dari sebagian produktivitas, kesehatan, makanan, kehidupan keluarga, kebudayaan, rekreasi, dan partisipasi adalah merupakan manfaat sosial bagi masyarakat. Agar anak dapat memperoleh pendidikan yang baik maka orang tua harus pandai mengarahkan agar anaknya tidak terpengaruh apabila kondisi sosial mereka tidak mendukung tercapainya pendidikan dengan baik. Orang tua juga harus mengusahakan agar lingkungan sosial di sekitar dapat dijadikan sebagai pendukung tercapainya pendidikan yang maksimal. Stabilitas ekonomi ialah dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Stabilitas sendiri akan dicapai ketika terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestic, tabungan dan investasi. Stabilitas perekonomian suatu Negara tidak

stabil maka akan menimbulkan masalah-masalah ekonomi suatu negara itu sendiri seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, dan tingginya tingkat inflasi. Pendidikan vokasi (pendidikan ekonomi) merupakan tiang utama dalam kemajuan ekonomi suatu bangsa. Filosofi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi ini untuk menopong kemajuan dan tumbuhnya ekonomi suatu bangsa karena tolak ukur keberhasilan penyelenggara pendidikan vokasi adalah apakah ada pertumbuhan ekonomi yang sehat? Pendidikan vokasi ini dan ekonomi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang pada gilirannya akan menumbuhkan kekuatan ekonom nasional. Pendidikan yang bernilai baik bagi individu dan juga untuk bangsa, akan menghasilkan pekerja yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik, menaikkan kualitas kehidupan mereka, dan akhirnya ikut berkontribusi menaikkan tingkat ekonomi bangsa. Stabilitas politik merupakan kondisi dinamis yang proses pembagian kekuasaan dalam negara yang tidak boleh liar, tidak konstitusional dan keluar dari nilai-nilai demokrasi berdasar Pancasila dan UUD NRI 1945. Penguatan sipil dan hak politik, penciptaan kondisi aman, peningkatan akses dan kalitas informasi public. Hal ini dianggap penting karena beberapa isu yang dikembangkan di bidang polhukam banyak menegasi dinamisnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebijakan Stabilisasi menjadi strategi yang dilakukan oleh pemerintah atau bank sentral yang bertujuan untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang sehat dan perubahan harga yang minimal Pendidikan kejuruan diselenggarakan pada suatu lembaga berupa institusi bidang pendidikan baik sekunder, pos sekunder perguruan tinggi teknik yang dikendalikan pemerintah atau

masyarakat industri (Kuswana, 2013). Pendidikan kejuruan difokuskan pada penyediaan tenaga kerja terampil pada berbagai sektor seperti perindustrian, pertanian dan teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi (Afwan, 2013). Berdasarkan asumsi-asumsi yang ada, pendidikan kejuruan merupakan jenis pendidikan yang unik karena bertujuan untuk mengembangkan pemahaman, sikap dan kebiasaan kerja yang berguna bagi individu sehingga dapat memenuhi kebutuhan sosial, politik, dan ekonomi sesuai dengan ciri yang dimiliki. Pendidikan dan pelatihan kejuruan merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan pada kebutuhan industri sehingga peningkatan dan pengembangan individu dapat dilakukan di industri (Zaib & Harun, 2014). Berdasar teori yang ada, pendidikan kejuruan berpeluang untuk menjawab tantangan industri 4.0. Tantangan tersebut harus dijawab dengan cepat dan tepat agar tidak berkontribusi terhadap peningkatan pengangguran. Pemerintah berupaya merespon tantangan industri 4.0, ancaman pengangguran, dan bonus demografi dengan fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan kejuruan di tahun 2018. Pemerintah melalui kebijakan lintas kementerian dan lembaga mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan pemerintah adalah revitalisasi pendidikan kejuruan Indonesia. Dukungan dari pemerintah harus mencakup, 1) sistem pembelajaran, 2) satuan pendidikan, 3) peserta didik, dan 4) pendidik dan tenaga kependidikan juga dibutuhkan Revitalisasi sistem pembelajaran meliputi, 1) kurikulum dan pendidikan karakter, 2) bahan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, 3)

kewirausahaan, 4) penyelarasan, dan 5) evaluasi. Satuan pendidikan meliputi, 1) unit sekolah baru dan ruang kelas baru, 2) ruang belajar lainnya, 3) rehabilitasi ruang kelas, 4) asrama siswa dan guru, 5) peralatan, dan 6) manajemen dan kultur sekolah. Elemen peserta didik meliputi, 1) pemberian beasiswa dan 2) pengembangan bakat minat. Elemen pendidik dan tenaga kependidikan meliputi, 1) penyediaan, 2) distribusi, 3) kualifikasi, 4) sertifikasi, 5) pelatihan, 6) karir dan kesejahteraan, dan 7) penghargaan dan perlindungan. Prioritas penggunaan sumber daya yang terbatas, memfasilitasi inovasi teknologi, dan mendukung peningkatan industri dalam bentuk suatu kebijakan menjadi faktor yang sangat krusial bagi pemerintah negara berpenghasilan menengah untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan Stabilitas kondisi sosial sebagai dapat dimanfaatkan dalam masyarakat dari suatu program pendidikan berupa suatu program pendidikan adalah berupa perbaikan dalam hal penghasilan, produktivitas, kesehatan, nutrisi, kehidupan keluarga, kebudayaan, rekreasi, dan partisipasi masyarakat, sedangkan stabilitas ekonomi sendiri merupakan tiang utama dalam kemajuan ekonomi suatu bangsa, dan stabilitas politik Hal ini dianggap penting karena beberapa isu yang dikembangkan di bidang polhukam banyak menegasi dinamisnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebijakan Stabilitas menjadi strategi yang dilakukan oleh pemerintah atau bank sentral yang bertujuan untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang sehat dan perubahan harga yang minima

D. CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang penulis lakukan tentang

analisis Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Tujuan utama dari revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi untuk menyiapkan SDM yang kompeten, produktif, dan berdaya saing sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin mengembangkan kemampuan peserta didik dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. 2) Perumusan tujuan dan sasaran telah dirumuskan dengan jelas dan konsisten. 3) Perumusan kebijakan Implementasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah didasarkan pada landasan teori yang kuat dan terpercaya di antaranya Teori Kecocokan Pekerjaan dan Pendidikan, Teori Human Capital, Teori Pilihan Rasional, Teori Kompetensi, dan teori kejuruan 4) Proses Implementasi sudah didasarkan kepada Dasar Hukum yang jelas 5) Komitmen dan Keahlian dari Para Pelaksana Kebijakan sudah naik tetapi perlu ditingkatkan lagi 6) Implementasi Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah mendapatkan dukungan dari stekholder yaitu mitra industri mencapai skor 3,46 dari skala 4, 7) Implementasi Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah mendapatkan dukungan SMK Pusat Keunggulan sebanyak 373 SMK dari sekitar 1.400 SMK Pusat Keunggulan telah mengimplementasikan Skema Pemदानan Dukungan dengan melibatkan 349 industri mitra. 8) Prioritas penggunaan sumber daya yang terbatas, memfasilitasi inovasi teknologi, dan mendukung peningkatan industri dalam bentuk suatu kebijakan menjadi faktor yang sangat krusial bagi pemerintah negara berprestasi menengah untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan Stabilitas kondisi sosial sebagai dapat dimanfaatkan dalam masyarakat dari suatu program pendidikan berupa suatu program pendidikan adalah berupa perbaikan dalam hal penghasilan, produktivitas, kesehatan, nutrisi, kehidupan keluarga, kebudayaan, rekreasi, dan partisipasi masyarakat, sedangkan stabilitas ekonomi sendiri merupakan tiang utama dalam kemajuan ekonomi suatu bangsa, dan stabilitas politik Hal ini

dianggap penting karena beberapa isu yang dikembangkan di bidang politik banyak menegasi dinamisnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebijakan Stabilitas menjadi strategi yang dilakukan oleh pemerintah atau bank sentral yang bertujuan untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang sehat dan perubahan harga yang minimal 2. Rekomendasi Berdasarkan hasil analisis dapat dikemukakan beberapa rekomendasi untuk perbaikan implementasi Pendidikan vokasi dan pelatihan di antaranya a. Perlunya Kerjasama leboh banyak dengan Mitra Industri b. Perlunya memperhatikan ketersediaan sarana-prasarana yang lebih lengkap c. Pengembangan Kecakapan Kewirausahaan d. Penyeragaman dengan potensi daerah atau kearifan lokal bukan hanya fokus terhadap dunia industri

REFERENCES

- Afwan, M. (2013). Leadership on technical and vocational education in community college [Versi elektronik]. *Journal of Education and Practice*, 4 (21), 21-23.
- Afwan, M. (2013). Leadership on technical and vocational education in community college [Versi elektronik]. *Journal of Education and Practice*, 4 (21), 21-23
- American Institutes for Research in Behavioral Science." (1980). In *Educational Training Components (ETC)*, Madison, Wis.: The Vocational Snidy Center.
- Anjasari, Pita. *Manajemen Lingkungan dan Stakeholder Pendidikan*, academia edu, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Ashmore, M Catherine, and Geannina Guzman. (1988). *Entrepreneurship Program Database*. Columbus: The Ohio State University, National Center for Research in Vocational Education.
- Edmon, A., & Oluyi, A. (2014). Re-engineering technical vocational education and training toward safety practice skill needs of sawmill workers against workplace hazards in Nigeria [Versi elektronik]. *Journal of Education*

and Practice, 5 (7), 150- 157

- Nadyya Nulhusni, A Muri Yusuf dan Afdal Afdal. 2021. Analisis Teori Holland dalam Bimbingan dan Konseling Karir. SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling. <https://jurnal.iicet.org/index.php/schoulid/article/view/930/pdf> Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelatihan Kerja
- Prosser, C.A., & Allen, C.R. (1952). Vocational Education in a Democracy. New York : Century
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Wardiman Joyonegoro, (1998).
- Pengembangan sumberdaya manusia melalui SMK. Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offse